



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL**

JALAN BUKIT DUMAR NO 1, KOMPLEK PPN TUAL
KOTAMADYA TUAL KODEPOS 97651
TELEPON (0916) 21696 (LACAK), FAKSIMILE (0916) 21606
Laman: www.kkp.go.id ; Surel: psdkp.tual@kkp.go.id

Nomor : B.1429/PSDKPLan.6/KU.520/V/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Penyampaian LK Tingkat Satker Periode Tahun 2024
(Audited)

9 Mei 2025

Yth.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tual
di _ tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tual nomor: S-219/KPN.3203/2025 tanggal 17 April 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 (Audited), dapat kami sampaikan bahwasanya satuan kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual (440853) telah menyelesaikan penginputan seluruh transaksi keuangan dan barang serta melakukan tutup periode 14 (ADJ 2 2024) secara permanen pada seluruh modul pelaporan dan telah menyusun LK Tahun 2024 (Audited). Maka bersama dengan ini kami menyampaikan Laporan Keuangan Periode Tahun 2024 (Audited) Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tual



Ditandatangani
Secara Elektronik

Erik Sostenes



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN



**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PANGKALAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL
TAHUN 2024
Audited**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KAPTEN PILAR

DAFTAR ISI

Cover	- 1 -
DAFTAR ISI	- 2 -
KATA PENGANTAR.....	- 5 -
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	- 6 -
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	- 9 -
II. NERACA.....	- 10 -
III. LAPORAN OPERASIONAL.....	- 11 -
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	- 12 -
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	- 13 -
A. PENJELASAN UMUM.....	- 13 -
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pangkalan Pengawasan SDKP Tual.....	- 13 -
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	- 19 -
A.3. Basis Akuntansi	- 19 -
A.4. Dasar Pengukuran.....	- 20 -
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	- 20 -
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	- 29 -
B.1 Pendapatan	- 31 -
B.2 Belanja	- 32 -
B.3 Belanja Pegawai	- 33 -
B.4 Belanja Barang.....	- 34 -
B.5 Belanja Modal.....	- 36 -
B.5.1 Belanja Modal Tanah	- 36 -
B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	- 36 -
B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	- 37 -
B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	- 38 -
B.5.5 Belanja Modal Lainnya	- 38 -
B.6 Belanja Bantuan Sosial.....	- 38 -
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	- 39 -
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran.....	- 39 -
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan.....	- 39 -
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	- 39 -
C.4 Piutang Bukan Pajak.....	- 39 -
C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)-	40 -
C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.....	- 40 -

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar.....	- 40 -
C.8 Belanja Dibayar di Muka.....	- 40 -
C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima.....	- 40 -
C.10 Persediaan	- 41 -
C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	- 44 -
C.12 Tagihan Penjualan Angsuran	- 45 -
C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	- 45 -
C.14 Tanah.....	- 45 -
C.15 Peralatan dan Mesin.....	- 46 -
C.16 Gedung dan Bangunan	- 47 -
C.17 Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan.....	- 48 -
C.18 Aset Tetap Lainnya	- 49 -
C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	- 50 -
C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	- 50 -
C.21 Aset Tak Berwujud.....	- 51 -
C.22 Aset Lain-Lain.....	- 52 -
C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	- 53 -
C.24 Hibah Yang Belum Disahkan.....	- 53 -
C.25 Utang kepada Pihak Ketiga	- 53 -
C.26 Utang yang belum diterima Tagihannya	- 53 -
C.25 Uang Muka dari KPPN	- 53 -
C.26 Pendapatan Diterima Dimuka.....	- 54 -
C.28 Ekuitas	- 54 -
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	- 55 -
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	- 55 -
D.2 Beban Pegawai.....	- 55 -
D.3 Beban Persediaan.....	- 56 -
D.4 Beban Barang dan Jasa	- 57 -
D.5 Beban Pemeliharaan	- 58 -
D.6 Beban Perjalanan Dinas.....	- 59 -
D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	- 59 -
D.8 Beban Bantuan Sosial	- 59 -
D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	- 60 -
D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	- 60 -
D.11 Kegiatan Non Operasional.....	- 60 -
D.12 Pos Luar Biasa	- 61 -

E.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	- 62 -
E.1	Ekuitas Awal.....	- 62 -
E.2	Surplus (Defisit) LO	- 62 -
E.3.1	Penyesuaian Nilai Aset.....	- 62 -
E.3.2	Koreksi Nilai Persediaan	- 62 -
E.3.3	Koreksi Atas Reklasifikasi	- 62 -
E.3.4	Selisih Revaluasi Aset Tetap	- 63 -
E.3.5	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	- 63 -
E.3.6	Koreksi Lain-Lain.....	- 64 -
E.4	Transaksi Antar Entitas.....	- 64 -
E.4.1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	- 65 -
E.4.2	Transfer Masuk/Transfer Keluar.....	- 65 -
E.4.3	Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung..	- 65 -
E.5	Ekuitas Akhir	- 66 -
F.	PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.....	- 67 -
F.1	KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SEBELUM TANGGAL NERACA.....	- 67 -
F.2	PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN	- 72 -

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pangkalan Pengawasan SDKP Tual adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan *Pangkalan Pengawasan SDKP Tual* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pangkalan Pengawasan SDKP Tual. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tual, 9 Mei 2025
Kepala Pangkalan PSDKP Tual



Ditandatangani
Secara Elektronik

Erik Sostenes, S.St.Pi, M.Si.
19850316 200701 1 006



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL**

JALAN BUKIT DUMAR NOMOR 1 KOMPLEKS PPN TUAL KOTAMADYA TUAL
KODE POS 97611 TELEPON (0916) 21696, FAKSIMILI (0916) 21606
LAMAM <https://kkp.go.id> EMAIL psdkp.tual@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pangkalan PSDKP Tual yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tual, 9 Mei 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Pangkalan PSDKP Tual



Ditandatangani
Secara Elektronik

Erik Sostenes, S.St.Pi, M.Si
19850316 200701 1 006

Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Periode Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode Tahun terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak yaitu sebesar Rp 40,903,967,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Tahun Anggaran 2024. Nilai Aset Tahun Anggaran 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp51,940,024,829,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp652,779,811,- Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0, Aset Tetap (neto) sebesar Rp 50,177,470,648,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp331,816,300.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp99,123,290,- dan Rp51,840,901,539,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar (Rp4,650,063),- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar (Rp56,811,627,112),- sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp56,806,977,049. Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus sebelum Pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp381,503,466) dan sebesar Rp57,188,480,515 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp57,188,480,515.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tahun 2024 adalah sebesar Rp52,913,337,599,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp57,188,480,515) ditambah dengan koreksi persediaan senilai Rp0 dan dikurangi dengan koreksi nilai aset tetap/lainnya non revaluasi senilai Rp0 ditambah dengan koreksi nilai aset tetap non revaluasi senilai Rp105,582,101,- dikurangi koreksi nilai aset lainnya non revaluasi senilai Rp0 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp56,010,380,004,- dan penurunan ekuitas senilai (Rp1,072,436,060) sehingga

Ekuitas Akhir pada periode Tahun 2024 adalah senilai Rp51,840,901,539,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	40.903.967	0,00	113.798.018
JUMLAH PENDAPATAN		-	40.903.967	0,00	113.798.018
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	11.924.652.000	11.921.535.977	99,97	10.737.164.730
Belanja Barang	B.4	56.467.511.000	41.731.356.254	73,90	42.758.635.369
Belanja Modal	B.5	2.344.400.000	2.344.391.740	100,00	787.787.413
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		70.736.563.000	55.997.283.971	79,16	54.283.587.512

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL NERACA UNTUK TAHUN 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	16.470.000
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	(82.350)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	652.779.811	663.464.596
Jumlah Aset Lancar		652.779.811	679.852.246
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	18.111.467.000	17.914.787.000
Peralatan dan Mesin	C.15	80.102.413.341	82.660.082.020
Gedung dan Bangunan	C.16	18.918.125.194	18.361.988.619
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	24.948.642.274	24.948.642.274
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	142.680.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	64.183.430	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(91.189.402.521)	(91.737.316.093)
Jumlah Aset Tetap		50.955.428.718	52.290.863.820
ASET LAINNYA			
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.21	331.816.300	-
Aset Lain-Lain	C.22	14.300.000	14.300.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(14.300.000)	(14.300.000)
Jumlah Aset Lainnya		331.816.300	-
JUMLAH ASET		51.940.024.829	52.970.716.066
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.24	66.546.360	57.378.467
Utang yang belum ditagihkan	C.25	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.25	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		66.546.360	57.378.467
JUMLAH KEWAJIBAN		66.546.360	57.378.467
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	51.840.901.539	52.913.337.599
JUMLAH EKUITAS		51.840.901.539	52.913.337.599
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		51.907.447.899	52.970.716.066

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	4.650.063	108.022.685
JUMLAH PENDAPATAN		4.650.063	108.022.685
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	11.931.244.626	10.720.865.730
Beban Persediaan	D.3	393.830.226	380.275.925
Beban Barang dan Jasa	D.4	29.779.448.193	34.511.042.322
Beban Pemeliharaan	D.5	6.362.567.422	3.695.241.767
Beban Perjalanan Dinas	D.6	5.205.654.442	3.838.534.527
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	6.114.600.777	6.287.288.323
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	49.500
JUMLAH BEBAN		(59.787.345.686)	(59.433.298.094)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		59.782.695.623	59.325.275.409
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Defisit Pelepasan Aset	D.11	(381.503.466)	40.833.333
Pendapatan Pelepasan Aset		(19.783.904)	(40.833.333)
Beban Pelepasan Aset		(401.287.370)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(381.503.466)	40.833.333
SURPLUS SEBELUM POS LUAR BIASA		60.164.199.089	59.284.442.076
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNBPN	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		60.164.199.089	59.284.442.076

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	52.913.337.599	58.059.025.189
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(57.188.480.515)	(59.284.442.076)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	105.664.451	(1.197.008)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	105.582.101	(7.734.158)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	82.350	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	56.010.380.004	54.139.951.494
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS		(1.072.436.060)	(5.145.687.590)
EKUITAS AKHIR	E.5	51.840.901.539	52.913.337.599

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pangkalan Pengawasan SDKP Tual

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Pangkalan Pengawasan SDKP Tual didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur melalui peraturan Menteri Nomor:PER.04/MEN/2006 tanggal 12 September 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Berdasarkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B2712/M.PAN/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 di bentuk UPT Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual yang bersifat lebih operasional dan mandiri, hal ini dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dibebankan pada Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Stasiun Pengawasan SDKP Tual ditingkatkan status kelembagaannya menjadi Pangkalan Pengawasan SDKP Tual setingkat Eselon IIIa yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal PSDKP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Struktur penyusunan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan di dalam Renstra KKP 2020-2024 mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada tingkat kementerian/lembaga menetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis (*outcome/impact*) beserta indikator kinerjanya yang berpedoman pada RPJMN. Selanjutnya unit Eselon I dengan dijembatani oleh Arah Kebijakan dan Strategi, merumuskan Program, Sasaran Program (*outcome*) beserta indikator kinerjanya dan Kegiatan, Sasaran Kegiatan beserta indikator kinerjanya pada tingkat Eselon II.

Visi KKP 2020-2024 yang ditetapkan adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang

Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mewujudkan Visi KKP 2020-2024 tersebut maka dirumuskan Misi KKP 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
- 2) Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
- 3) Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 4) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Sebagai penjabaran Visi dan Misi KKP maka dirumuskan beberapa Tujuan KKP 2020-2024 yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis berikut indikator kinerjanya. Pada 5 (lima) tahun ke depan, Ditjen. PSDKP akan berkontribusi pada beberapa Tujuan KKP 2020-2024 berikut ini:

- 1) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui pencapaian Sasaran Strategis Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat dengan indikator kinerja Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024. Formula perhitungan IKMKP dibangun oleh 2 aspek utama yaitu: ekonomi dan sosial-kelembagaan. Data tingkat keaktifan atau partisipasi Pokmaswas akan menjadi salah satu variabel pada aspek sosial-kelembagaan.
- 2) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pencapaian beberapa Sasaran Strategis, diantaranya:
 - a. Tata kelola SDKP bertanggung jawab dengan indikator kinerja Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, dari 89% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024;

- b. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif dengan indikator kinerja:
 - I. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing, dari 54,18% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024; dan
 - II. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan, dengan target 93% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- 3) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui pencapaian Sasaran Strategis Tatakelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator kinerja berikut ini:
 - a. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 80 pada tahun 2020 menjadi 85 pada tahun 2024 dan
 - b. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

Visi Ditjen PSDKP adalah pembangunan kelautan dan perikanan Direktorat Jenderal PSDKP 2020 - 2024 adalah "Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terawasi, lestari, dan bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan"

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka ditetapkan misi :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP
2. Mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP
3. Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP
4. Memastikan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
5. Memastikan kemanfaatan SDKP bagi masyarakat Kelautan dan Perikanan.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020 - 2024 adalah :

1. Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP
2. Terlindunginya SDKP dari kegiatan yang illegal dan merusak
3. Memastikan kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan yang kondusif.

Visi Pangkalan PSDKP Tual adalah pembangunan kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Tual 2020 - 2024 adalah "Pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terawasi, lestari, dan bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan di Lingkup Pangkalan PSDKP Tual"

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka ditetapkan misi :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Tual
2. Mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Tual
3. Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Tual
4. Memastikan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Tual
5. Memastikan kemanfaatan SDKP bagi masyarakat KP di Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Tual.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Tual tahun 2020 - 2024 adalah :

1. Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual
2. Terlindunginya SDKP dari kegiatan yang illegal dan merusak Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual
3. Memastikan kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan yang kondusif Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual.

Wilayah kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual meliputi 3 Propinsi (Maluku, Papua dan Papua Barat) dan 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni :

- a. WPP 714, meliputi perairan Laut Banda;
- b. WPP 715, meliputi perairan Laut Seram, Laut Halmahera dan Teluk Bintuni;
- c. WPP 718, meliputi Laut Aru dan Laut Arafuru.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pangkalan PSDKP

Tual terdiri dari 2 (dua) unit kapal pengawas perikanan tipe C, 1 (satu) unit *speedboat* Pengawas ukuran 16 m, 1 (satu) unit *speedboat* Pengawas ukuran 6,5 m, 7 (tujuh) unit *speedboat* Pengawas ukuran 12 m yang tersebar di Satuan Pengawasan dan Wilayah Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual, 1 (satu) unit *Rubber Boat*, 1 (satu) unit *Rigid Inflatable Boat*. Dalam hal prasarana (infrastruktur), Pangkalan PSDKP Tual memiliki 1 (satu) kantor pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang merupakan Gedung utama, 3 (tiga) unit kantor Satuan Pengawasan (non Eselon) dan 3 (tiga) unit kantor Wilayah Kerja (non Eselon). Pangkalan PSDKP Tual juga memiliki dermaga kapal pengawas perikanan, Gudang barang bukti, serta mini laboratorium. Kemudian prasarana yang sangat diandalkan dalam melakukan pemantauan kapal-kapal ikan adalah *Regional Monitoring Center (RMC)*. Pengoperasian RMC mengintegrasikan data dari *Vessel Monitoring System (VMS)*, *RadarSat*, dan *Automatic Identification System (AIS)* sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam hal operasi pencegahan (*intercept*) oleh armada kapal pengawas.



Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, Pangkalan PSDKP Tual didukung oleh 140 (seratus empat puluh empat) orang sumber daya manusia dari tingkat pejabat eselon III sampai dengan pelaksana/staf .

Rincian jumlah pegawai negeri sipil pada Pangkalan PSDKP Tual Sebanyak 91 orang yang terdiri dari Golongan II sebanyak 23 Orang dan Golongan III sebanyak 66 Orang

dan Golongan IV sebanyak 2 Orang. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai di alokasikan untuk 91 orang pusat dan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNP) 49 orang. Rincian Pegawai Pangkalan PSDKP Tual adalah sebagai berikut:

No	Unit Kerja	ASN PUSAT	Pegawai Kontrak	Jumlah
1	Pangkalan PSDKP Tual	30	29	59
2	WILKER PSDKP Dobo	2	3	5
3	WILKER PSDKP Warabal	0	2	2
4	SATWAS Maluku Tenggara Barat	3	1	4
5	SATWAS Merauke	9	2	11
6	SATWAS Sorong	7	3	10
7	WILKER Raja Ampat	2	1	3
8	SATWAS Mimika	5	2	7
9	SATWAS Kaimana	2	3	5
10	WILKER Fakfak	2	2	4
11	WILKER Wimro	0	1	1
12	KP. Hiu 14	11	0	11
13	KP. Hiu Macan 006	15	0	15
14	Tugas Belajar	3	0	3
Jumlah		91	49	140

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.82/MEN/KU.611/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2018 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

<i>Kuasa Pengguna Anggaran</i>	<i>Sigit Bintoro, S.Pi</i>
	19721022 199803 1 004

Kerangka pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang kaitannya dengan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Tual bersumber dari dana APBN yang direncanakan dengan mempertimbangkan luasan wilayah kerja dan beban kerja pengawasan SDKP yang ada dilapangan dan mengaju pada program kerja yang mendukung visi dan misi Kementerian/Lembaga. Rincian kerangka pendanaan Pangkalan PSDKP Tual terdiri dari:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemantauan dan Operasi Armada	Rp 46.364.712.000
2	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp 441.000.000
3	Pengawasan Pengelolaan Sumber daya Kelautan	Rp 1.373.000.000
4	Pengawasan Pengelolaan Sumber daya Perikanan	Rp 1.770.000.000
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	Rp 20.757.851.000
Total Anggaran		Rp 70.706.563.000

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode Triwulan III Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Tual. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pangkalan Pengawasan SDKP Tual menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pangkalan Pengawasan SDKP Tual. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Sehubungan dengan Implementasi Metode Penilaian Persediaan secara First In First Out (FIFO) di Periode 30 September Tahun 2024 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021, maka pencatatan transaksi mutasi persediaan baik persediaan masuk dan persediaan keluar agar dilakukan sesuai dengan urutan kronologis transaksi. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - ✓ Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - ✓ Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - ✓ Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari

KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah

dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya

apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1 .000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang – undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset

Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pangkalan Pengawasan SDKP Tual telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi DIPA dilakukan sebanyak 9(sembilan) kali. Rincian revisi terdiri dari:

Revisi DIPA ke-	Tanggal Revisi DIPA	Pertimbangan Revisi DIPA
Revisi ke - 1	25-Jan-24	Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, Ditjen PSDKP mendapatkan blokir AA sebesar Rp83.004.572.000,- yang bersumber dari anggaran Rupiah Murni (RM) Berkaitan dengan hal tersebut PSDKP Tual mendapatkan Blokir AA sebesar Rp. 949.524.000 dan Buka Blokir Perangkat Pengolah Data sebesar Rp. 150.000.000
Revisi ke - 2	28-Feb-24	Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024
Revisi ke - 3	22 April 2024	Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024
Revisi ke - 4	1 Mei 2024	Buka anggaran yang diblokir sebesar total Rp. 82.250.000 yang di revisi ke anggaran Listrik Darat yang disebabkan karena adanya peningkatan biaya Listrik Darat dikarenakan potensi pada Tahun 2024 banyak Kapal Pengawas Perikanan yang melakukan Pengawasan di Zona 3 (WPP 718) sehingga harus bersandar di Dermaga Pangkalan PSDKP Tual dan Pengurangan Volume Output Dikarenakan terjadi kesalahan pada sistem SAKTI pada saat penginputan sehingga mengakibatkan Volume Output pada 2355.CAN (Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan 2355.EBB (Layanan Sarana dan Prasarana Internal) terinput otomatis mengikuti Volume Output TA.2023 dimana yang seharusnya 2355.CAN hanya 6 Unit menjadi 12 Unit dan 2355. EBB yang seharusnya 5 Unit menjadi 6 Unit.

Revisi DIPA ke-	Tanggal Revisi DIPA	Pertimbangan Revisi DIPA
Revisi ke - 5	6 Juni 2024	Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024
Revisi ke - 6	11 Juli 2024	hanya Revisi Halaman III DIPA meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024.
Revisi ke - 7	11 Oktober 2024	hanya Revisi Halaman III DIPA meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta Revisi Penghematan Perdin.
Revisi ke - 8	5 November 2024	Revisi DJA Buka Blokir RCG Perawatan Kapal Pengawas sebesar Rp115.000.000.
Revisi ke - 9	21 November 2024	Revisi Penghematan Perdin 50% Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor: S-1023/ MK.02-2024 Tanggal 7 November 2024.

- a. **Revisi DIPA ke 01** Revisi Blokir AA sebesar Rp. 949.524.000 dan Buka Blokir Perangkat Pengolah Data sebesar Rp. 150.000.000
- b. **Revisi DIPA ke 02** Revisi Halaman III DIPA meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024.
- c. **Revisi DIPA ke 03** Revisi Halaman III DIPA yang meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024.
- d. **Revisi DIPA ke 04** Buka anggaran yang diblokir sebesar total Rp.82.250.000 yang di revisi ke anggaran Listrik Darat oleh karena adanya peningkatan biaya Listrik Darat dikarenakan potensi pada Tahun 2024 banyak Kapal Pengawas Perikanan yang melakukan Pengawasan di Zona 3 (WPP 718) dan bersandar di Dermaga Pangkalan PSDKP Tual dan Pengurangan Volume Output Dikarenakan terjadi kesalahan pada sistem SAKTI pada saat penginputan sehingga mengakibatkan Volume Output pada 2355.CAN (Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan 2355.EBB (Layanan Sarana dan Prasarana Internal) terinput otomatis mengikuti Volume Output TA.2023 dimana yang seharusnya 2355.CAN hanya 6 Unit menjadi 12 Unit dan 2355. EBB yang seharusnya 5 Unit menjadi 6 Unit.

- e. **Revisi DIPA ke 05** Revisi Halaman III DIPA yang meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024.
- f. **Revisi DIPA ke 06** hanya Revisi Halaman III DIPA yang meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan PSDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024.
- g. **Revisi DIPA ke 07** hanya Revisi Halaman III DIPA meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan PSDKP Tual serta Revisi Penghematan Perjalanan Dinas.
- h. **Revisi DIPA ke 08** Revisi DJA Buka Blokir RCG Perawatan Kapal Pengawas sebesar Rp115.000.000.
- i. **Revisi DIPA ke 09** Revisi Penghematan Perdin 50% Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor: S-1023/MK.02-2024 Tanggal 7 November 2024.

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp40,903,967,-*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp40,903,967,-. Pendapatan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Tual terdiri dari Penerimaan Negara yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa:

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin **Rp19,783,904,-**
 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar **Rp4,650,063,-**
 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar **Rp16,470,000,-**

Rincian realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

Rincian Realisasi Pendapatan

Uraian	TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin		19.783.904	
Pendapatan dari denda penyelesaian pekerjaan pemerintah		4.650.063	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL		16.470.000	
Jumlah	-	40.903.967	-

- ⇒ Terdapat Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin atas Risalah Lelang nomor 118/17.02/2024-01 tanggal 22 April 2024 berupa 1 (satu) unit Speedboat Merk/Type Napoleon 44 dengan panjang 12 m dan Tahun Perolehan 2015 memiliki harga lelang senilai **Rp4.977.952,00** (empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang dibuktikan dengan nomor NTB **141564505596** dan nomor NTPN **3F79461QV3RSCOHR**.
- ⇒ Terdapat Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin atas Risalah Lelang nomor 100/17.03/2024-01 tanggal 13 Mei 2024 berupa 1 (satu) unit Speedboat Merk/Type Napoleon 43 dengan panjang 12 m dan Tahun Perolehan 2015 memiliki harga lelang senilai **Rp10.185.952,00** (sepuluh juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang dibuktikan dengan nomor NTB **373230913170** dan nomor NTPN **78E9C1JNFV2KAMAF**.
- ⇒ Terdapat Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin atas Risalah Lelang nomor: 299/08.06/2024-01 tanggal 3 Juli 2024 berupa Bongkaran Repleting KP.Hiu Macan 06 Berupa Besi Scrap Sebanyak \pm 1.000 Kg yang memiliki harga lelang senilai **Rp4.620.000,00** (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- ⇒ Terdapat Pendapatan dari Denda atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai **Rp3,931,037** dengan rincian:
- Pos Pengawasan SDKP Sorong senilai Rp1.608.750
 - Pembuatan Repairlist docking Kapal Pengawas senilai Rp1.516.882
 - Pengadaan Drone, GPS, Kamera dan Water Quality Meter senilai Rp805.405
- ⇒ Terdapat hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Belanja Pegawai Tugas Belajar di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP, UPT Pangkalan PSDKP Tual terhitung mulai tahun 2022 s/d tahun 2023 yaitu senilai **Rp16,470,000,-** sesuai Surat Tugas Anggota IV BPK RI Nomor: 01/ST/VI/01/2024 tanggal 9 Januari 2024. Berikut akan dijelaskan secara detail berdasarkan tabel dibawah ini.

*Realisasi Belanja
Negara
Rp55,997,283,971,-*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp55.997.283.971 atau 79,16% dari anggaran belanja sebesar Rp70,736,563,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

Uraian	TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	11.924.652.000	11.921.535.977	99,97
Belanja Barang	56.467.511.000	41.731.356.254	73,90
Belanja Modal	2.344.400.000	2.344.391.740	100,00
Belanja Bantuan Sosial			-
Total Belanja Kotor	70.736.563.000	55.997.283.971	79,16
Pengembalian			-
Jumlah	70.736.563.000	55.997.283.971	79,16

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,16% yaitu senilai Rp55,997,283,480,-. Hal ini disebabkan karena pagu anggaran belanja TA.2024 mengalami penambahan terutama pada belanja barang dan belanja pegawai.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	11.921.535.977	10.737.164.730	11,03
Belanja Barang	41.731.356.254	42.758.635.369	(2,40)
Belanja Modal	2.344.391.740	787.787.413	197,59
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	55.997.283.971	54.283.587.512	3,16

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai
Rp11,921,535,977,-*

Realisasi Belanja Pegawai UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing - masing sebesar Rp11,921,535,977 dan Rp10,737,164,730 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 11,03 persen dari TA 2023. Hal ini di sebabkan karena adanya kenaikan pangkat pegawai dan kenaikan gaji berkala. Realisasi belanja Pegawai

Pangkalan PSDKP Tual untuk pegawai Sebanyak 91 orang yang terdiri dari Golongan II sebanyak 23 Orang dan Golongan III sebanyak 66 Orang, Golongan IV sebanyak 2 Orang dan PPPK sebanyak 49 Orang. Rincian anggaran dan realisasi belanja Pegawai TA 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.431.859.094	4.137.284.646	7,12
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	417.046.895	-	100,00
Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja PNS	3.725.273.283		
Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja PPPK	347.498.643	3.520.727.200	(90,13)
Jumlah Belanja Kotor	8.921.677.915	7.658.011.846	16,50
Pengembalian Belanja Pegawai	3.031.416	-	
Jumlah Belanja	8.918.646.499	7.658.011.846	16,46

Pengembalian Belanja Pegawai sebesar (Rp3,031,416) terdiri dari:

- Belanja Pembulatan Gaji PNS senilai Rp1,416
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS senilai Rp810,000
- Belanja Tunjangan Umum PNS senilai Rp2,220,000

B.4 Belanja Barang

Belanja
Barang
Rp,-
41.731.356.254

Realisasi Belanja Barang UPT Pangkalan PSDKP Tual TA.2024 dan TA.2023 adalah masing-masing sebesar Rp41,731,356,254,- dan Rp42,758,635,369,-. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar 2,40 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan karena pagu anggaran belanja barang mengalami blokir dalam pengelolaan anggaran tahun 2024.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2.023.438.993	2.104.334.425	(3,84)
Belanja Barang Non Operasional	15.373.649.265	16.159.645.773	(4,86)
Belanja Barang Persediaan	292.040.898	257.815.835	13,28
Belanja Jasa	971.523.241	917.527.108	5,88
Belanja Pemeliharaan	2.303.903.462	2.217.149.310	3,91
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.173.314.322	2.243.120.794	41,47
Jumlah Belanja Kotor	24.137.870.181	23.899.593.245	1,00
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	24.137.870.181	23.899.593.245	1,00

- Belanja Barang Operasional pada Pangkalan PSDKP Tual antara lain seperti belanja keperluan perkantoran, penambah daya tahan tubuh, pengiriman surat dinas baik ke kantor pusat maupun satwas-wilker, dan honor operasional Satker.

- Belanja barang Non Operasional antara lain seperti Belanja Bahan untuk Uang Makan Awak Kapal Pengawas, konsumsi kegiatan seperti kegiatan penyidikan, Uang Makan ABK, Uang Jaga Barang Bukti, Biaya Perpanjangan STNK dan Honor output kegiatan. Dimana penetapan harga dan besaran nilai rupiah pada RAK-KL Pangkalan PSDKP Tual belum memiliki dasar hukum pembayaran berupa SBML dari Kementerian Keuangan tetapi masih menggunakan penetapan harga sendiri.
- Belanja Barang Persediaan pada Pangkalan PSDKP Tual antara lain seperti Belanja Persediaan Bahan Bakar, Air Bersih, pelumas dan obat-obatan untuk Kapal Pengawas, *Speedboat*, *Rigit Inflatable Boat* dan *Rubber Boat*, Persediaan Alat Tulis Kantor, *Computer Supply*, dan penjilidan, pengadaan SLO, Keperluan kantor seperti Alat Rumah Tangga, Air Minum, Alat Kebersihan dan belanja barang persediaan lainnya.
- Belanja jasa pada Pangkalan PSDKP Tual antara lain seperti Belanja Langganan Listrik, Telepon dan Air, Belanja Sewa, Honor Narasumber kegiatan, Ongkos angkut BBM Kapal Pengawas dan Belanja Jasa Lainnya.
- Belanja pemeliharaan pada Pangkalan PSDKP Tual meliputi : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, contohnya *Docking* Kapal Pengawas, Perbaikan Darurat dan Rutin Kapal Pengawas, Perbaikan Rutin *Speedboat*, *Rigit Inflatable Boat* dan *Rubber Boat*, Pemeliharaan Komputer, Laptop, AC, Genset, Kendaraan Dinas, Inventaris Kantor dan lain-lain; dan pemeliharaan gedung dan bangunan.
- Belanja perjalanan dinas dalam negeri pada Pangkalan PSDKP Tual meliputi : Perjalanan Dinas dalam rangka Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan, Transpor lokal untuk kegiatan pengawasan Sumber daya kelautan (SDK) dan Sumber daya perikanan (SDP) diantaranya pengawasan Destuctive Fishing, Pengawasan Ekspor Impor dan pengawasan SDP dan SDK lainnya, Transport lokal dan perjalanan dinas yang terkait dengan administrasi dan keuangan dan belanja perjalanan dinas dalam negeri lainnya.
- Pada tanggal 31 September 2024 terdapat sisa bahan bakar minyak (BBM) berjenis Dexlite pada Kapal Pengawas lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Tual sebanyak **29,629 Liter** dengan nilai **Rp660,074,862,-**. Berikut rincian penjelasannya:

Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Hiu Macan 06 memiliki sisa BBM jenis Dexlite sebanyak **15.179 liter** dengan nilai **Rp338,157,762,-**
Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Hiu 14 memiliki sisa BBM jenis Dexlite sebanyak **14.450 liter** dengan nilai **Rp321,917,100,-**.

**Belanja
Modal**
Rp2,344,391,740,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Pangkalan Pengawasan SDKP Tual TA. 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.344.391.740 dan Rp787.787.413. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal TA. 2024 mengalami kenaikan signifikan sebesar 197,59 persen bila dibandingkan TA. 2023 dikarenakan terdapat Pekerjaan Fisik Gedung dan Bangunan serta kenaikan Belanja Peralatan dan Mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Periode TA. 2024 dan TA. 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.424.692.865	787.787.413	80,85
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	919.698.875	0	100,00
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	2.344.391.740	787.787.413	197,59
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	2.344.391.740	787.787.413	197,59

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	-
Jumlah Belanja	0	0	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pangkalan PSDKP Tual TA. 2024 dan TA. 2023 adalah sebesar Rp1,424,692,865,- dan Rp739,817,725,-. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2024 mengalami kenaikan signifikan yaitu sebesar (70,54) persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2024 dan TA. 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	1.424.692.865	739.817.725	92,57
Jumlah Belanja Kotor	1.424.692.865	739.817.725	92,57
Jumlah Belanja	1.424.692.865	739.817.725	92,57

- Transaksi pembelian senilai Rp1.424.692.865 dengan rincian barang sebagai berikut:

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Nilai (Rp)	Ket
1	3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	884.500.000	
2	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	1	21.750.000	
3	3.03.03.01.072	Global Positioning System	1	7.750.000	
4	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	3	4.185.000	
5	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	28	56.960.000	
6	3.05.02.01.008	Meja Rapat	1	19.850.000	
7	3.05.02.04.004	A.C. Split	1	7.499.925	
8	3.05.02.06.002	Televisi	2	13.450.000	
9	3.06.01.02.128	Camera Digital	2	34.750.000	
10	3.06.01.05.047	Kamera Udara	1	42.750.000	
11	3.08.01.46.002	Water Quality Checker	1	8.250.000	
12	3.10.01.02.001	P.C Unit	1	29.999.000	
13	3.10.01.02.002	Lap Top	7	151.999.990	
14	3.10.01.02.009	Tablet PC	16	140.998.950	
JUMLAH				1.424.692.865	

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp59,362,800,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami perubahan signifikan bila dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan karena terdapatnya perencanaan dan pengawasan pembangunan fisik di TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	789.353.645	787.787.413	100,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	130.345.230	0	100,00
Jumlah Belanja Kotor	919.698.875	787.787.413	100,00
Pengembalian Belanja Modal	0	-	-
Jumlah Belanja	919.698.875	787.787.413	100,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp.919,698,875 berupa:

No	Nama Barang	Satuan	Nilai (Rp)	Ket
1	Gedung Tahanan Karantina	1	214.327.800	
2	Bangunan Rumah Tahanan Lainnya	1	341.808.775	
3	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Pos Pengawasan Kapal Sorong	1	64.183.430	
3	Pembangunan Pos Pengawasan Kapal Sorong	1	299.378.870	
JUMLAH			919.698.875	

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dikarenakan tidak terdapat Belanja Modal baik Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	-
Belanja Modal Irigasi	0	0	-
Belanja Modal Jaringan	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp0,-*

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan 2023

Keterangan	TA 2024	TA 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	-	-
Jumlah	-	-

Pada TA 2024 telah dilakukan Penihilan dan Pengembalian Sisa Uang Persediaan senilai Rp177.892.940,00 dengan nomor NTPN 2982B6QT9MCPIETG

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp.0,-*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0,- dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas
Rp.0,-*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.4 Piutang Bukan Pajak

*Piutang
Bukan Pajak
Rp0,-*

Saldo Piutang PNP Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp16.470.000. Piutang PNP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum

diselesaikan pembayarannya.

*Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0,-*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian
Lancar TPA
Rp0,-*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar
Rp0,-*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp.0 dan (Rp.82,350). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor.

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp0,-*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima Rp0,-*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan

Rp 652,779,811,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 652.779.811 dan Rp 663.464.596. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Mutasi Persediaan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Persediaan per 1 Januari 2024		663.464.596
Mutasi Tambah		
Jumlah Pembelian	967.669.321	
Reklasifikasi Aset		
Jumlah Mutasi Tambah		967.669.321
Mutasi Kurang		
Beban Persediaan Konsumsi	(393.830.226)	
Beban Persediaan Suku Cadang	(574.424.656)	
Hasil Opname Fisik Persediaan Kurang	(1.531.800)	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		
Jumlah Mutasi Kurang		(978.354.106)
Saldo per 30 Juni 2023		652.779.811

Rincian Persediaan TA. 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2024 dan TA 2023

Jenis	TA 2024	TA 2023
Barang Konsumsi	27.416.572	51.341.660
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	625.363.239	612.121.936
Barang Persediaan Bahan Baku	-	-
Jumlah	652.779.811	663.463.596

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Persediaan berupa:

Barang Konsumsi (kode 117111) senilai Rp27.416.572,- terdiri dari:

- Alat Tulis (kode 1010301001) senilai Rp807.262,-
- Penjepit Kertas (kode 1010301003) Senilai Rp219.000,-
- Penghapus/Korektor (kode 1010301004) Senilai Rp62.340,-
- Ordner dan Map (kode 1010301006) Senilai Rp2.004.400,-
- Penggaris (kode 1010301007) senilai Rp15.000,-
- Cutter/Alat Tulis Kantor (kode 1010301008) Senilai Rp247.498,-
- Alat Perekat (kode 1010301010) senilai Rp505.133,-
- Steples (kode 1010301012) senilai Rp.28.167,-
- Isi Steples (kode 1010301013) senilai Rp.45.065,-
- Alat Tulis Kantor Lainnya (kode 1010301999) Senilai

Rp424.532,-

- Kertas HVS (kode 1010302001) senilai Rp1.211.500,-
- Kertas Cover (kode 1010302003) senilai Rp28.166,-
- Amplop (kode 1010302004) senilai Rp137.590,-
- Tinta/Toner Printer (kode 1010304004) senilai Rp5.834.919,-
- USB/Flash Disk (kode 1010304006) Rp175.000,-
- Kartu Memori (kode 1010304007) Rp450.000,-
- Mouse (kode 1010304010) senilai Rp549.000,-
- Bahan Komputer Lainnya (kode 1010304999) Senilai Rp49.000,-
- Batu Baterai (kode 1010306010) senilai Rp96.500,-
- Perlengkapan Dinas Lainnya (kode 1010307999) Senilai Rp14.526.500,-

Suku Cadang (kode 117114) senilai Rp625.363.239,- terdiri dari Suku Cadang Alat Angkutan Apung Bermotor (Kode 1010201003) dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE BARANG		URAIAN KODE BARANG	FISIK		NILAI
				KUANTITAS	SATUAN	
1	1010201003	000074	'PERKINS 1006 TG 2AM OIL FILTER	30	Buah	9.435.222
2	1010201003	000078	'PERKINS 1006 TG 2AM FUEL FILTER	23	Buah	20.551.650
3	1010201003	000079	'PERKINS 4.4 TGM FUEL FILTER	38	Buah	58.643.520
4	1010201003	000080	'PERKINS 4.4 TGM OIL FILTER	49	Buah	14.141.400
5	1010201003	000081	'PERKINS 4.4 TGM RACOR FILTER	52	Buah	12.615.000
6	1010201003	000104	ALB SPARK PLUG BKR6E	6	Buah	294.000
7	1010201003	000125	RIB PLUG, SPARK (LKR6E)	4	Buah	473.444
8	1010201003	000127	RIB FILTER FUEL 15412-92J00-000	2	Buah	359.460
9	1010201003	000128	RIB FILTER ASSY, OIL	1	Buah	180.631
10	1010201003	000129	RIB IMPELLER, WATER PUMP	1	Buah	329.450
11	1010201003	000134	RIB ANODE, PROTECTION 55321-87J01-000	3	Buah	262.350
12	1010201003	000145	'CUMMINS KTA 50 M2 OIL FILTER	30	Buah	8.255.070
13	1010201003	000146	'CUMMINS KTA 50 M2 COOLANT FILTER	18	Buah	6.058.800
14	1010201003	000147	'CUMMINS KTA 50 M2 FUEL FILTER (WIX 33144)	9	Buah	1.831.500
15	1010201003	000148	'MAN D 2842 LE410 FUEL FILTER	28	Buah	28.680.000
16	1010201003	000150	'MAN D 2842 LE410 RACOR FILTER	36	Buah	13.987.000
17	1010201003	000151	'MAN D 2842 LE410 OIL FILTER	12	Buah	10.800.000
18	1010201003	000152	'MAN D 2842 LE410 SENSOR COOL PRESS AFT WATERPUMP	3	Buah	48.757.660
19	1010201003	000167	NAPOLEON 49 FUEL FILTER	1	Buah	1.570.000

20	1010201003	000178	CUMMINS KTA 50 M2 FUEL FILTER (2018)	12	Buah	4.595.400
21	1010201003	000182	PERKINS 1006 TG 2AM AIR FILTER SEKUNDER (2019)	8	Buah	2.640.000
22	1010201003	000184	MAN D 2842 LE410 IMPELLER SEA WATER PUMP	2	Buah	14.850.000
23	1010201003	000186	MAN D 2842 LE410 GEAR BOX FILTER (2018)	8	Buah	31.532.300
24	1010201003	000188	PERKINS 4.4 TGM RACOR FILTER (2018)	2	Buah	341.000
25	1010201003	000193	PERKINS 4.4 TGM AIR FILTER 26510342	12	Buah	8.473.000
26	1010201003	000194	PERKINS 4.4 TGM IMPELLER (2018)	3	Buah	1.551.000
27	1010201003	000195	PERKINS 4.4 TGM WARE PLATE SEA WATER PUMP (2018)	5	Buah	2.475.000
28	1010201003	000196	PERKINS 4.4 TGM CAM DG (2018)	1	Buah	902.000
29	1010201003	000197	PERKINS 404D-22 FUEL FILTER (2019)	13	Buah	858.000
30	1010201003	000198	PERKINS 404D-22 OIL FILTER (2019)	12	Buah	990.000
31	1010201003	000199	PERKINS 404D-22 AIR FILTER (2018)	2	Buah	1.100.000
32	1010201003	000200	PERKINS 404D-22 AIR FILTER (2019)	5	Buah	2.475.000
33	1010201003	000201	CUMMINS KTA 50 M2 AIR FILTER (2018)	9	Buah	22.723.254
34	1010201003	000202	CUMMINS KTA 50 M2 RACOR FILTER (2018)	40	Buah	10.604.000
35	1010201003	000203	CUMMINS KTA 50 M2 OIL FILTER BY PASS (2018)	18	Buah	5.286.708
36	1010201003	000213	ALB O RING SET	2	Buah	206.800
37	1010201003	000218	RIB PLUG DRAIN 55128-93L00-000	4	Buah	462.000
38	1010201003	000285	CABLE ASSY, THROTTLE (63610-92L00-000) RAJA AMPAT	2	Buah	298.000
39	1010201003	000286	IMPELLER, WATER PUMP (17461-96312-000) RAJA AMPAT	1	Buah	229.000
40	1010201003	000287	HOSE FUEL (65700-87DL2-000) RAJA AMPAT	1	Buah	1.236.675
41	1010201003	000288	PROPELLER (DT 40) (58100-88LA0-019) RAJA AMPAT	1	Buah	2.660.000
42	1010201003	000289	FILTER ASSY FUEL (15410-94401-000) RAJA AMPAT	1	Buah	197.000
43	1010201003	000310	RIB ELEMNT SET	4	Buah	1.135.136
44	1010201003	000311	PERKINS 1006 RACOR FILTER 2010	36	Buah	9.590.400
45	1010201003	000313	PERKINS 1006 FUEL FILTER 26560145	18	Buah	14.095.890
46	1010201003	000314	PERKINS 1006 AIR FILTER PRIMER/AIR CLEANER OUT 26510342	19	Buah	12.954.309
47	1010201003	000325	NAPOLEON 49 RACOR BBM	4	Buah	600.000
48	1010201003	000340	PERKINS 4.4 TGM AIR FILTER 26510343	4	Buah	1.450.000
49	1010201003	000343	PERKINS 4.4 TGM SENSOR OLI (KUS-K-E21103) 0-10 BAR HIU 14	8	Buah	11.766.000
50	1010201003	000347	PERKINS 1006 TG 2AM VDO SENSOR	5	Buah	5.272.500

			OIL0-5 BAR HMC 6			
51	1010201003	000369	JETS OIL FILTER	2	Buah	343.000
52	1010201003	000371	MAN AIR FILTER 51.08301-0016	4	Buah	21.312.000
53	1010201003	000372	MAN PIN 51.91301- 0103	4	Buah	2.760.000
54	1010201003	000375	PERKINS 4.4 TGM V- BELT 2614B554	2	Buah	2.109.000
55	1010201003	000377	PERKINS 4.4 TGM SEAL THERMOSTAT HOUSING	10	Buah	8.325.000
56	1010201003	000382	MAN CAM MAN ELEKTRIK	1	Buah	8.072.960
57	1010201003	000383	MAN WEAR PLATE	3	Buah	11.692.440
58	1010201003	000385	RIB BUSH, DRIVE SHAF	2	Buah	654.954
59	1010201003	000389	RIB O RING 31123- 94910-000	2	Buah	190.990
60	1010201003	000390	RIB SPRING 31135- 94900-000	5	Buah	225.500
61	1010201003	000391	RIB O RING 48585- 95E00-000	2	Buah	58.558
62	1010201003	000397	JETS PLUG, SPARK (CR9EB)	6	Buah	303.000
63	1010201003	000405	NAPOLEON 49 RING SET 879288074	4	Buah	20.248.176
64	1010201003	000409	ALB BUSH WATER PUMP CASE	2	Buah	68.200
65	1010201003	000433	JETS SCREEN INTAKE	1	Buah	1.185.766
66	1010201003	000434	JETS GUNWALE BOW	1	Buah	505.834
67	1010201003	000435	CUMMINAS 4 BT HARBOUR AIR FILTER AF 4327HMC 06	4	Buah	1.022.532
68	1010201003	000455	NAPOLEON 18 INSERT FILTER RACOR PARKER	4	Buah	1.642.800
69	1010201003	000457	HIGH DEPTH 20 MICRON	2	Buah	8.547.000
70	1010201003	000458	COALESCER 10 MICRON	2	Buah	8.547.000
71	1010201003	000459	NAPOLEON 49 HARNES ENGINE 8M0159568	2	Buah	80.586.000
72	1010201003	000460	NAPOLEON 49 BERAING 10 MM 884006	2	Buah	2.800.000
73	1010201003	000461	NAPOLEON 49 VALVE 879172103	2	Buah	33.386.000

- Nilai Persediaan yang tercantum dalam laporan Neraca persediaan adalah nilai persediaan yang terletak di Pangkalan PSDKP Tual dan termasuk dengan nilai persediaan pada Kapal Pengawas, Satwas dan Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Tual periode TA. 2024.

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan
TP/TGR
Rp0,-

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual TA. 2024 dan TA. 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya

yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0,-*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual TA.2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0,-*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual TA. 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah
Rp18.111.467.000*

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp18.111.467.000,- dan Rp17.914.787.000. Terdapat Perubahan nilai mutasi aset tetap Tanah sampai pada tanggal pelaporan yaitu senilai Rp196,680.000,-.

Rincian mutasi nilai asset tanah di jelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	17.914.787.000
Mutasi tambah:	196.680.000
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	18.111.467.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 30 Desember 2024	18.111.467.000

1. Hibah masuk tanah seluas 1.500 m2 senilai Rp54.000.000 ke Pangkalan PSDKP Tual sesuai dengan sesuai dengan BAST Nomor 000.2.4/270/SETDA dan Nomor 867/SJ/PL.450/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dan NPHD Nomor 000.2.32/269/SETDA dan Nomor 866/SJ/PL.750/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024. Tanah tersebut telah bersertifikat hak pakai dengan NIB 33.06.000000210.0 Tanggal 18 November 2024 An. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp142.680.000,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai surat koreksi pencatatan aset tetap Nomor: B.4824/PSDKPLan.6/PL.710/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024.

C.15 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin
Rp80.102.413.341,-*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing - masing adalah Rp80,102,413,341 dan Rp82,660,082,020. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	82.660.082.020
Mutasi tambah:	
Pembelian Peralatan/Mesin	1.424.692.865
Mutasi kurang:	-
Penghentian Penggunaan	(3.982.361.544)
Transaksi Reklas Aset Tetap ke Aset lainnya	-
Saldo per 31 Desember 2024	80.102.413.341
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(68.078.932.312)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	12.023.481.029

- Mutasi transaksi Penambahan peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Nilai (Rp)	Ket
1	3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	884.500.000	
2	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	1	21.750.000	
3	3.03.03.01.072	Global Positioning System	1	7.750.000	
4	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	3	4.185.000	
5	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	28	56.960.000	
6	3.05.02.01.008	Meja Rapat	1	19.850.000	
7	3.05.02.04.004	A.C. Split	1	7.499.925	
8	3.05.02.06.002	Televisi	2	13.450.000	
9	3.06.01.02.128	Camera Digital	2	34.750.000	
10	3.06.01.05.047	Kamera Udara	1	42.750.000	
11	3.08.01.46.002	Water Quality Checker	1	8.250.000	
12	3.10.01.02.001	P.C Unit	1	29.999.000	
13	3.10.01.02.002	Lap Top	7	151.999.990	
14	3.10.01.02.009	Tablet PC	16	140.998.950	
JUMLAH				1.424.692.865	

- Mutasi transaksi Pengurangan peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Barang	Nama Barang	Nilai (Rp)	Ket
1				
TOTAL MUTASI MASUK			0	

➤ Penghentian Penggunaan

No	Kode Barang	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	3020302001	Napholeon 43/FRP in Board 12 Meter	1.991.180.772
2	3020302001	Napholeon 44/FRP in Board 12 Meter	1.991.180.772
Total Mutasi Penghentian Penggunaan			3.982.361.544

⇒ Terdapat Penghentian Aset dari Penggunaan pada Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual senilai **Rp3.982.361.544** diantaranya:

1. Melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: 950/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara yaitu berupa Speedboat dengan Tipe Napholeon 43/FRP in Board 12 Meter senilai **Rp1.991.180.772**; Status barang dalam kondisi rusak berat.
2. Melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: 806/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara yaitu berupa Speedboat dengan Tipe Napholeon 44/FRP in Board 12 Meter senilai **Rp1.991.180.772**; Status barang dalam kondisi rusak berat.

C.16 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan UPT Pangkalan PSDKP Tual TA.2024 dan TA.2023 masing-masing adalah Rp18,918,125,194 dan Rp18.918.125.194,- dan Rp18.361.988.619. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	18.361.988.619
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	556.136.575
Mutasi kurang:	-
Koreksi Kesalahan Input IP	-
Saldo per 30 September 2024	18.918.125.194
Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan	(2.537.344.945)
Nilai Buku per 30 September 2024	16.380.780.249

➤ Mutasi transaksi Penambahan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Nilai (Rp)	Ket
1	4.01.01.21.003	Gedung Tahanan Karantina	1	214.327.800	
2	4.01.01.21.999	Bangunan Rumah Tahanan Lainnya	1	341.808.775	
JUMLAH				556.136.575	

1. Terdapat Pembangunan Gedung Tahanan Karantina berupa Ruang Isolasi Pangkalan PSDKP Tual sesuai nomor kontrak 1392/PSDKPLan.6/PL.420/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 dan nomor BAST 1802/PSDKPLan.6/PL.450/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
2. Terdapat Pembangunan Rumah Tahanan berupa Ruang Penampungan Sementara Pangkalan PSDKP Tual sesuai nomor kontrak 1340/PSDKPLan.6/PL.420/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 dan nomor BAST 1812/PSDKPLan.6/PL.450/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024.

C.17 Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp24.948.642.274,-*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp24.948.642.274 dan Rp24.948.642.274. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	24.948.642.274
Mutasi tambah:	
Pembelian Jaringan	-
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	
Koreksi Kesalahan Input IP Irigasi	-
Saldo per 31 Desember 2024	24.948.642.274
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(20.573.125.264)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	4.375.517.010

Saldo Awal Tahun hingga Saldo Akhir Tahun menunjukkan nilai perolehan yang sama yaitu sebesar Rp24.948.642.274 hal ini dikarenakan tidak terdapat penambahan aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disajikan pada Laporan Keuangan ini.

C.18 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0,-*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual TA. 2024 dan TA. 2023 masing-masing adalah Rp0 dan Rp142.680.000. Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	142.680.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	(142.680.000)
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Sesuai dengan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2017 dengan Nomor 14B/LHP/XVII/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, Pangkalan PSDKP Tual terdapat beberapa temuan antara lain:

Aset Tetap Lainnya yang masih mempunyai nilai perolehan namun belum disusutkan/akumulasi penyusutan bernilai Rp0,00 berupa Tanah Dalam Renovasi senilai Rp142.680.000 pada Wilker PSDKP Raja Ampat dan telah ditindaklanjuti melalui Kapitalisasi ATR ke Aset Hibah berupa Tanah Raja Ampat senilai

Rp54.000.000 ke Pangkalan PSDKP Tual sesuai dengan sesuai dengan BAST Nomor 000.2.4/270/SETDA dan Nomor 867/SJ/PL.450/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dan NPHD Nomor 000.2.32/269/SETDA dan Nomor 866/SJ/PL.750/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.

Terdapat mutasi kurang Aset Tetap Lainnya pada Pangkalan PSDKP Tual melalui transaksi Koreksi Pencatatan Tanah Dalam Renovasi berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Modul Aset Tetap Nomor B.4824/PSDKPlan.6/PL.710/XII/2024 Tanggal 20 Desember 2024.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp 64,183,430,-*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual pada TA 2024 adalah sebesar **Rp64,183,430** sementara pada TA 2023 adalah sebesar Rp 0,-.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	64.183.430
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2024	64.183.430
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	64.183.430

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun Anggaran 2024 senilai **Rp64.183.430** berupa:

1. Perencanaan Pembangunan Pos Pengawasan Kapal Sorong berdasarkan Kontrak Nomor 220/PSDKPlan.6/PL.420/II/2024 Tanggal 29 Februari 2024.
2. Pengawasan Pembangunan Pos Pengawasan Kapal Sorong berdasarkan Kontrak Nomor 1044/PSDKPlan.6/PL.420/VIII/2024 Tanggal 5 Agustus 2024.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing

(Rp91.189.402.521)

adalah (Rp91,189,402,521) dan (Rp91,737,316,093). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2024*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	79.939.412.476	68.078.932.312	11.860.480.164
2	Gedung dan Bangunan	18.361.988.619	2.537.344.945	15.824.643.674
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.948.642.274	20.573.125.264	4.375.517.010
Akumulasi Penyusutan		123.250.043.369	91.189.402.521	32.060.640.848

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.21 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

*Dana yang
dibatasi
Penggunaannya
Rp331,816,300,-*

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar **Rp331,816,300** dan Rp0. Dana yang dibatasi penggunaannya adalah dana yang penggunaannya telah ditentukan dan tidak bisa digunakan secara bebas. Berikut akan dijelaskan lebih rinci:

1. SPM Nomor 00003A Tanggal 3 Januari 2024 berupa Perencanaan Pos Pengawasan Sorong BAST Nomor 1884/PSDKPLan.6/PL.420/XII/2024 Tanggal 27 Desember 2024 senilai **Rp 7.936.500,00**;
2. SPM 00004A Tanggal 3 Januari 2024 berupa Pengawasan Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Sorong Termin I sesuai BAST Nomor 1887/PSDKPLan.6/PL.420/XII/2024 Tanggal 27-12-2024, senilai **Rp 22.050.837,00**;
3. SPM 00005A Tanggal 3 Januari 2024 berupa Pembayaran Pengawasan Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Sorong Termin II sesuai BAST Nomor 1889/PSDKPLan.6/PL.420/XII/2024 Tanggal 27-12-2024 senilai **Rp 2.450.093,00**;
4. SPM 00009A Tanggal 3 Januari 2024 berupa Pembayaran Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Sorong sesuai BAST Nomor 20/PSDKPLan.6/PL.420/I/2025 Tanggal 08-01- 2025, senilai **Rp 299.378.870,00**.

*Aset Tak Berwujud
Rp0,-*

C.22 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-Lain
Rp14.300.000,-*

C.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain Pangkalan PSDKP Tual 31 Desember 2024 dan Saldo nilai perolehan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah Rp14,300,000 dan Rp14,300,000. Terdapat Penghentian Aset dari penggunaan sebesar (Rp14.300.000). Aset Lain-Lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Aset tersebut sudah diajukan Penghapusan sesuai dengan surat nomor: B.3624/PSDKPLan.6/PL.750/IX /2024 tanggal 27 September 2024.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	14.300.000
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset dari Penggunaan	
Saldo per 31 Desember 2024	14.300.000

- Mutasi transaksi Penambahan aset lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Barang	Nama Barang	Nilai (Rp)	Ket
TOTAL MUTASI MASUK			0	

- Mutasi transaksi Pengurangan aset lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Barang	Nama Barang	Nilai (Rp)	Ket
TOTAL MUTASI MASUK			0	

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp14.300.000)*

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual pada TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah (Rp14.300.000) dan (Rp14.300.000). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Hibah Yang
Belum
Disahkan
Rp0,-*

C.25 Hibah Yang Belum Disahkan

Hibah yang belum disahkan UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp98,983,790,-*

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada pihak ketiga Pangkalan PSDKP Tual pada TA 2024 adalah sebesar Rp98,983,790. Utang tersebut terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp25,128,649 Belanja Barang sebesar Rp41.417.711 dan Utang kepada pihak ke-3 lainnya sebesar Rp32.437.430. Saldo Utang kepada pihak ketiga tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Utang kepada Pihak Ketiga	Nilai
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	25.128.649
Belanja Barang yang masih harus dibayar	41.417.711
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	32.437.430
Total	98.983.790

*Utang yang
Belum
Ditagihkan
Rp0,-*

C.27 Utang yang belum ditagihkan

Saldo Utang yang belum ditagihkan kepada pihak ketiga Pangkalan PSDKP Tual pada TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah Rp0,- dan Rp0,-.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp0,-*

C.28 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN

merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.29 Pendapatan Diterima Dimuka

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0,-*

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka di Pangkalan PSDKP Tual per TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

*Ekuitas
Rp51,841,041,039
,-*

C.30 Ekuitas

Ekuitas Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp51,841,041,039 dan Rp52,913,337,599. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp24,433,967,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp24,433,967,- dan Rp148,856,018,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	4.650.063	108.022.685	(95,70)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	19.783.904	40.833.333	(51,55)
Jumlah	24.433.967	148.856.018	(83,59)

Pada Laporan Operasional, Perbandingan antara Pendapatan PNBP TA.2024 dengan TA.2023 mengalami penurunan signifikan hal ini dikarenakan pada TA.2023 terdapat PNBP yang berasal dari Denda Administratif.

Terdapat Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin atas Risalah Lelang nomor: 299/08.06/2024-01 tanggal 3 Juli 2024 berupa Bongkaran Repleting KP.Hiu Macan 06 Berupa Besi Scrap Sebanyak ± 1.000 Kg yang memiliki harga lelang senilai **Rp4.620.000,00** (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp, 11,931,244,626,-

Jumlah Beban Pegawai Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp11.931.244.626 dan Rp10.720.865.730. Terdapat kenaikan beban pegawai sebesar 11,29 (%) persen jika dibandingkan dengan TA 2023. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pagu anggaran untuk Gaji dan Tunjangan Khusus PNS dan PPPK.

Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	5.633.313.431	5.365.389.480	4,99
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	542.432.748	84.099.250	544,99
Beban Uang Lembur PNS	26.394.000	45.911.000	-42,51
Beban Uang Lembur PPPK	4.653.000	-	100,00
Beban Tunjangan Khusus Kinerja PNS	5.210.081.174	5.133.563.000	1,49
Beban Tunjangan Khusus Kinerja PPPK	514.370.273	91.903.000	100,00
Jumlah	11.931.244.626	10.720.865.730	11,29

Uraian	Nilai
Belanja Pegawai TA 2024	11.921.535.977
Beban Pegawai TA 2024	11.931.244.626
Selisih	-9.708.649

Terdapat selisih sebesar **(Rp9,708,649)** antara Realiasi belanja Pegawai dengan Beban Pegawai pada TA 2024 yaitu:

1. Jurnal balik atas belanja pegawai berupa kekurangan uang makan PNS 8 hari kerja di bulan Desember tahun 2023 sebesar **(Rp14.532.000)**;
2. Jurnal balik atas belanja pegawai berupa kekurangan uang makan PNS 8 hari kerja di bulan Desember tahun 2023 sebesar **(Rp888.000)**;
3. Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS periode Desember 2024 untuk 4 Pegawai sesuai SPM Nomor: 00004T/440853/2024 tanggal 2 Januari 2025 dan Nomor SP2D 240841302000011 tanggal 3 Januari 2025 senilai **Rp25.128.649,-**

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp393,830,226,-

Jumlah Beban Persediaan Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp393,830,226,- dan Rp380,830,226. Terdapat kenaikan Beban Persediaan sebesar 3,56 (%) Persen bila dibandingkan dengan periode yang sama di Tahun 2023. Hal ini dikarenakan pagu anggaran mengalami penambahan sehingga menambah belanja barang persediaan konsumsi. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi dan suku cadang atas barang - barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	393.830.226	380.275.925	3,564
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	393.830.226	380.275.925	3,564

Beban Barang dan Jasa

Rp 29,779,448,193,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Pangkalan PSDKP Tual TA.2024 dan TA.2023 masing-masing adalah sebesar Rp29.779.448.193 dan Rp34.511.042.322. Hal ini mengalami penurunan sebesar 13,71 (persen) jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dikarenakan terjadi penurunan beban bahan dan tidak adanya beban penanganan pandemi Covid-19. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode TA.2024 dan TA.2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2.503.261.274	2.469.420.307	1,37
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	323.592.463	342.574.575	(5,54)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	90.410.620	74.623.259	21,16
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	123.174.000	200.748.000	(38,64)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	9.408.692	(100,00)
Beban Bahan	22.067.836.004	27.353.634.528	(19,32)
Belanja Honor Output Kegiatan	30.196.000	23.950.000	26,08
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.039.513.210	2.597.605.934	17,01
Beban Langganan Listrik	615.874.327	715.188.135	(13,89)
Beban Langganan Telpon	92.610.406	97.942.940	(5,44)
Beban Langganan Air	141.744.546	139.497.070	1,61
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	56.417.452	205.897.985	100,00
Beban Sewa	145.210.500	4.832.294	2905,00
Beban Jasa Profesi	23.100.000	12.200.000	100,00
Beban Jasa Lainnya	526.507.391	263.518.603	99,80
Jumlah	29.779.448.193	34.511.042.322	(13,710)

Uraian	Nilai
Belanja Barang dan Jasa TA 2024	29.779.988.949
Beban Barang dan Jasa TA 2024	29.779.448.193
Selisih	540.756

Terdapat selisih sebesar **(Rp540,756)** antara Realiasi belanja barang dan Jasa dengan Beban barang dan Jasa periode TA 2024 yaitu Selisih dari Beban Listrik, Telpon dan Air di Desember 2024 dengan Beban Listrik, Telpon dan Air di Desember 2023. Berikut akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Langganan	2024	2023	Selisih
Listrik	32.514.207	34.139.615	-1.625.408
Telepon	8.223.219	7.138.567	1.084.652
Air	680.285	680.285	0
Jumlah	41.417.711	41.958.467	- 540.756

*Beban
Pemeliharaan
Rp6,362,567,422,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing - masing adalah sebesar Rp6.362.567.422 dan Rp3.695.241.767. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan pada TA 2024 mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan TA 2023 hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada beban pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	933.065.839	594.249.645	57,02
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.850.346.927	2.648.971.114	83,10
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.730.000	86.952.230	(94,56)
Beban Persediaan Suku Cadang	574.424.656	0	100,00
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	365.068.778	(100,00)
Jumlah	6.362.567.422	3.695.241.767	72,183

Beban Perjalanan Dinas
Rp5,205,654,442,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp5,205,654,442 dan Rp3.838.534.527. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh bertambahnya anggaran perjalanan dinas bila dibandingkan dengan TA 2023. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	4.218.030.926	2.986.173.127	41,3
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	117.020.000	88.755.000	31,8
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	59.020.000	91.311.800	- 35,4
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	734.688.466	672.294.600	9,3
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	76.895.050	-	100,0
Jumlah	5.205.654.442	3.838.534.527	35,616

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Rp0,-

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Pangkalan PSDKP Tual per TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2018.

Beban Bantuan Sosial
Rp0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Pangkalan PSDKP TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp6,114,600,777,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp6,114,600,777 dan Rp6,287,288,323. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Periode TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.210.101.415	3.532.285.932	(9,12)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	404.778.578	399.217.212	1,39
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	4.783.320	13.088.229	(63,45)
Beban Penyusutan Irigasi	2.267.022.981	2.315.038.981	(2,07)
Beban Penyusutan Jaringan	27.270.799	27.270.799	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	200.643.684	387.170	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.114.600.777	6.287.288.323	-2,747

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp0,-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional
(Rp 381,503,466,-)

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing (Rp381.503.466) dan Rp40.833.333. Rincian Kegiatan Non Operasional TA. 2024 dan TA. 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset	19.783.904	40.833.333	(51,55)
Beban Pelepasan Aset	-401.287.370	0	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	-381.503.466	40.833.333	(1034,29)

Pelepasan Aset Non Lancar dari kegiatan Non Operasional merupakan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin yang meliputi:

- ❖ 1 (satu) unit Speedboat/Motor Tempel Merk/Tipe Napholeon 43/FRP in Board 12 Meter Tahun Perolehan 2015 sesuai Risalah Lelang nomor 100/17.03/2024-01 tanggal 13 Mei 2024 sebesar Rp10,185.952,- dengan nomor NTB: 373230913170 dan nomor NTPN: 78E9C1JNFV2KAMAF tanggal 14 Mei 2024;
- ❖ 1 (satu) unit Speedboat/Motor Tempel Merk/Tipe Napholeon 44/FRP in Board 12 Meter Tahun Perolehan 2015 sesuai Risalah Lelang nomor 118/17.02/2024-01 tanggal 22 April 2024 sebesar Rp4,977.952,- dengan nomor NTB: 141564505596 dan nomor NTPN: 3F79461QV3RSCOHR tanggal 24 April 2024;
- ❖ Bongkaran Repleting KP.Hiu Macan 06 Berupa Besi Scrap Sebanyak ± 1.000 Kg sesuai Risalah Lelang nomor 299/08.06/2024-01 tanggal 3 Juli 2024 sebesar Rp4,620.000,-

Beban Pelepasan Aset senilai **(Rp401,287,370)** merupakan nilai buku dari 2 (dua) unit Speedboat/Motor Tempel Merk/Tipe Napholeon 43/FRP in Board 12 Meter Tahun Perolehan 2015 yang sudah dilakukan Lelang karena kondisi dalam keadaan Rusak Berat dan tidak bisa digunakan lagi dalam operasional pemerintah.

D.12 Pos Luar Biasa

*Pos Luar Biasa
Rp0,-*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah Sebesar Rp0,- dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp52.913.337.599,-

Nilai ekuitas UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per 1 januari tahun 2024 dan 1 januari tahun 2023 masing-masing adalah sebesar Rp52,913,337,599,- dan Rp58,059,025,189.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
(Rp 57,188,341,015,-)

Jumlah Defisit LO Pangkalan PSDKP Tual untuk TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp57,188,341,015) dan (Rp (59,284,442,076)). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset Pangkalan PSDKP Tual untuk periode TA 2024 dan TA 2023 masing - masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan Pangkalan PSDKP Tual untuk periode TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0.

Koreksi Atas Reklasifikasi Aset Tetap
Rp0,-

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk periode periode 30 September 2024 dan 30 September tahun 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0.

**Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0**

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk periode 30 September 2024 dan 30 September 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penurunan selisih revaluasi aset tetap disebabkan oleh belum dilakukannya penilaian kembali terhadap aset tetap oleh KPKNL.

**Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp105,582,101,-**

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Pangkalan PSDKP Tual untuk periode TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp105,582,101 dan (Rp7,734,158). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

TGL DOK	KD BUKU BESAR	BAESWILSATK	KPP N	SALDO
30-10-23	AST-440853-298766028	032052100440853	084	1.991.180.772
30-10-23	AST-440853-298766040	032052100440853	084	300.965.527
30-10-23	AST-440853-298766044	032052100440853	084	1.690.215.245
30-10-23	AST-440853-298766046	032052100440853	084	0
30-10-23	AST-440853-298766115	032052100440853	084	1.991.180.772
30-10-23	AST-440853-298766117	032052100440853	084	300.965.527
30-10-23	AST-440853-298766118	032052100440853	084	1.690.215.245
30-10-23	AST-440853-298766119	032052100440853	084	0
22-12-18	AST-440853-319546694	032052100440853	084	604.097
15-08-22	AST-440853-319547428	032052100440853	084	3.816.478
15-08-22	AST-440853-319547721	032052100440853	084	8.237.053
15-08-22	AST-440853-319548014	032052100440853	084	8.049.741
22-12-18	AST-440853-319549285	032052100440853	084	7.445.644
15-08-22	AST-440853-319550154	032052100440853	084	7.258.332
22-12-18	AST-440853-319550485	032052100440853	084	6.758.332
18-09-23	AST-440853-319550656	032052100440853	084	6.633.144
22-12-18	AST-440853-319553100	032052100440853	084	5.290.767
15-08-22	AST-440853-319553467	032052100440853	084	5.103.455
15-08-22	AST-440853-319557833	032052100440853	084	4.916.143
22-12-18	AST-440853-319557969	032052100440853	084	4.312.046
15-08-22	AST-440853-319558153	032052100440853	084	4.124.734
15-08-22	AST-440853-319558651	032052100440853	084	3.188.172
15-08-22	AST-440853-319558943	032052100440853	084	3.000.860

22-12-18	AST-440853-319559233	032052100440853	084	2.396.763
15-08-22	AST-440853-319569895	032052100440853	084	1.460.201
23-12-15	AST-440853-319570702	032052100440853	084	106.647.701
23-05-23	AST-440853-319570968	032052100440853	084	106.489.525
23-05-23	AST-440853-319572023	032052100440853	084	106.331.349
15-08-22	AST-440853-319575637	032052100440853	084	106.144.037
15-08-22	AST-440853-319575911	032052100440853	084	105.956.725
15-08-22	AST-440853-319576129	032052100440853	084	105.769.413
15-08-22	AST-440853-319578241	032052100440853	084	105.582.101
20-12-24	AST-440853-394628974	032052100440853	084	37.097.899
20-12-24	AST-440853-394629011	032052100440853	084	105.582.101

Koreksi Lain-Lain
Rp82,350,-

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk periode TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp82,350,- dan Rp6,537,150. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Kode Akun	Nama Akun	Tanggal Jurnal	Kode Periode	Deskripsi	Nilai
391119	Koreksi Lainnya	30-Jun-24	2024-06	Jurnal balik atas penyisihan Piutang Kelebihan Pembayaran Tunjangan kepada Pegawai Tugas Belajar Tahun 2022-2023.	(82.350)
Total					(82.350)

Transaksi Antar Entitas
Rp 56,010,380,004,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas Pangkalan PSDKP Tual untuk periode TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp56,010,380,004,- dan Rp54,139,951,494,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(40.903.967)
Ditagihkan ke Entitas Lain	55.997.283.971
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	54.000.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	56.010.380.004

Sesuai dengan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2017 dengan Nomor 14B/LHP/XVII/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, Pangkalan PSDKP Tual terdapat beberapa temuan antara lain yaitu Aset Tetap Lainnya yang masih mempunyai nilai perolehan namun belum disusutkan/akumulasi penyusutan bernilai Rp0,00 berupa Tanah Dalam Renovasi senilai Rp142.680.000 pada Wilker PSDKP Raja Ampat dan telah ditindaklanjuti melalui Kapitalisasi ATR ke Aset Hibah berupa Tanah Raja Ampat senilai Rp54.000.000 ke Pangkalan PSDKP Tual sesuai dengan sesuai dengan BAST Nomor 000.2.4/270/SETDA dan Nomor 867/SJ/PL.450/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dan NPHD Nomor 000.2.32/269/SETDA dan Nomor 866/SJ/PL.750/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.

Terdapat mutasi kurang Aset Tetap Lainnya pada Pangkalan PSDKP Tual melalui transaksi Koreksi Pencatatan Tanah Dalam Renovasi berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Modul Aset Tetap Nomor B.4824/PSDKPlan.6/PL.710/XII/2024 Tanggal 20 Desember 2024.

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) (Rp40,903,967)/Rp55,997,283,971,-

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga periode TA 2024, DDEL sebesar (Rp40,903,967) sedangkan DKEL sebesar Rp 55,997,283,971.

Transfer Masuk/Transfer Keluar Rp0,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Pada periode hingga periode 30 September 2024, Transfer Masuk sebesar Rp0,-.

PHL & PPHL Rp54,000,000,-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas

pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung TA 2024 adalah sebesar Rp54,000,000 sesuai Penyampaian Pengesahan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Nomor B.4764/PSDKPLan.6/PL.750/XII/2024 Nomor: S-747/KPN.3203 /2024 Tanggal 20 Desember 2024.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp48,865,182,965,-

Nilai Ekuitas Pangkalan PSDKP Tual untuk TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp48,865,182,965 dan Rp52,913,337,599.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SEBELUM TANGGAL NERACA

- ⇒ Pada tanggal 31 Desember 2024 Pangkalan PSDKP Tual Melakukan Jurnal Penyesuaian Utang Kepada Pihak Ketiga terkait Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS periode Desember 2024 untuk 4 Pegawai sesuai SPM Nomor 00004T/440853/2024 tanggal 2 Januari 2025 dan Nomor SP2D 240841302000011 tanggal 3 Januari 2025 senilai **Rp25.128.649,-**
- ⇒ Pada tanggal 31 Desember 2024 Pangkalan PSDKP Tual Melakukan Jurnal Penyesuaian Utang Kepada Pihak Ketiga terkait Beban Langganan Telepon/Internet Bulan Desember 2024 lingkup Pangkalan, Satwas dan Wilker yaitu senilai **Rp8,223,219,-**
- ⇒ Pada tanggal 31 Desember 2024 Pangkalan PSDKP Tual Melakukan Jurnal Penyesuaian Utang Kepada Pihak Ketiga terkait Beban Langganan Listrik Bulan Desember 2024 lingkup Pangkalan, Satwas dan Wilker yaitu senilai **Rp32.514.207;**
- ⇒ Pada tanggal 31 Desember 2024 Pangkalan PSDKP Tual Melakukan Jurnal Penyesuaian Utang Kepada Pihak Ketiga terkait Beban Langganan Air Bulan Desember 2024 lingkup Pangkalan, Satwas dan Wilker yaitu senilai **Rp680.285.**
- ⇒ Pada tanggal 31 Desember 2024 Pangkalan PSDKP Tual Melakukan Jurnal Penyesuaian Utang yang belum diterima tagihannya terkait Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yaitu berupa Pembelian BBM Jenis Pertamina untuk kendaraan roda 2 di Wilker PSDKP RajaAmpat senilai **Rp139.500.**
- ⇒ Pada tanggal 31 Desember 2024 Pangkalan PSDKP Tual Melakukan Jurnal Penyesuaian Utang yang belum diterima tagihannya terkait Pembayaran RPATA berupa Perencanaan Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Sorong yaitu senilai **Rp7,936,500.**
- ⇒ Pada tanggal 31 Desember 2024 Pangkalan PSDKP Tual Melakukan Jurnal Penyesuaian Utang yang belum diterima tagihannya terkait Pembayaran RPATA berupa Pengawasan Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Sorong yaitu senilai **Rp22,050,837.**
- ⇒ Pada tanggal 31 Desember 2024 terdapat sisa bahan bakar minyak (BBM) berjenis Dexlite pada Kapal Pengawas lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Tual sebanyak **13,076 Liter** dengan nilai **Rp203,862,-**. Berikut rincian penjelasannya beserta dengan tabel:
 - Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Hiu Macan 06 memiliki sisa BBM jenis Dexlite sebanyak **8.811 liter** dengan nilai **Rp338,157,762,-**
 - Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Hiu 14 memiliki sisa BBM jenis Dexlite sebanyak **4.265 liter** dengan nilai **Rp321,917,100,-**

Nama Kapal	Bulan	Tanggal	BBM Sebelum Pengisian	BBM Pengisian	BBM Pemakaian	Sisa BBM
a	b	c	d	e	f	h (d+e-f)
KP. HIU MACAN 06	Januari	31/01/2024	36.765	-	294	36.471
	Februari	29/02/2024	36.471	-	471	36.000
	Maret	01/04/2024	36.000	-	26.560	9.440
	April	30/04/2024	9.440	45.000	21.839	32.601
	Mei	31/05/2024	32.601	125.000	114.201	43.400
	Juni	30/06/2024	43.400	10.000	51.973	1.427
	Juli	31/07/2024	1.427	50.000	24.651	26.776
	Agustus	31/08/2024	26.776	165.000	153.753	38.023
	September	30/09/2024	38.023	140.000	162.844	15.179
	Oktober	31/10/2024	15.179	100.000	109.079	6.100
	November	30/11/2024	6.100	135.000	95.000	46.100
	Desember	31/12/2024	46.100	80.440	117.729	8.811
KP. HIU 14	Januari	31/01/2024	13.570	-	36	13.534
	Februari	29/02/2024	13.534	-	292	13.242
	Maret	01/04/2024	13.242	984	10.441	3.785
	April	30/04/2024	3.785	-	1.345	2.440
	Mei	31/05/2024	2.440	59.000	48.383	13.057
	Juni	29/06/2024	13.057	-	1.104	11.953
	Juli	31/07/2024	11.953	-	103	11.850
	Agustus	31/08/2024	11.850	91.000	88.773	14.077
	September	30/09/2024	14.077	88.000	87.627	14.450
	Oktober	31/10/2024	14.450	136.000	144.685	5.765
	November	30/11/2024	5.765	12.000	13.115	4.650
	Desember	31/12/2024	4.650	-	385	4.265

⇒ Sesuai dengan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2017 dengan Nomor 14B/LHP/XVII/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, Pangkalan PSDKP Tual terdapat beberapa temuan antara lain:

Aset Tetap Lainnya yang masih mempunyai nilai perolehan namun belum disusutkan/akumulasi penyusutan bernilai Rp0,00 berupa Tanah Dalam Renovasi senilai **Rp142.680.000** pada Wilker PSDKP Raja Ampat dan telah ditindaklanjuti melalui Kapitalisasi ATR ke Aset Hibah berupa Tanah Raja Ampat senilai **Rp54.000.000** ke Pangkalan PSDKP Tual sesuai dengan sesuai dengan BAST Nomor 000.2.4/270/SETDA dan Nomor 867/SJ/PL.450/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dan NPHD Nomor 000.2.32/269/SETDA dan Nomor 866/SJ/PL.750/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.

⇒ Terdapat Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin atas Risalah Lelang nomor 118/17.02/2024-01 tanggal 22 April 2024 berupa 1 (satu) unit Speedboat Merk/Type Napoleon 44 dengan panjang 12 m dan Tahun Perolehan 2015 memiliki harga lelang senilai **Rp4.977.952,00** (empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang dibuktikan dengan nomor NTB **141564505596** dan nomor NTPN **3F79461QV3RSCOHR**.

⇒ Terdapat Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin atas Risalah Lelang nomor 100/17.03/2024-01 tanggal 13 Mei 2024 berupa 1 (satu) unit Speedboat Merk/Type Napoleon 43 dengan panjang 12 m

dan Tahun Perolehan 2015 memiliki harga lelang senilai **Rp10.185.952,00** (sepuluh juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang dibuktikan dengan nomor NTB **373230913170** dan nomor NTPN **78E9C1JNFV2KAMAF**.

⇒ Terdapat Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin atas Risalah Lelang nomor: 299/08.06/2024-01 tanggal 3 Juli 2024 berupa Bongkaran Repleting KP.Hiu Macan 06 Berupa Besi Scrap Sebanyak $\hat{A}\pm$ 1.000 Kg yang memiliki harga lelang senilai **Rp4.620.000,00** (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

⇒ Terdapat Pendapatan dari Denda atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai **Rp4,650,063** dengan rincian:

- Pembayaran Belanja Barang berupa Pembuatan Repairlist Docking Kapal Pengawas sesuai SP nomor: 286/PSDKPLan.6/PL.420/III/2024 Tgl 12-03-2024, BAST nomor: 572/PSDKP Lan.6-PPK/PL.420/V/2024 Tgl 11-05-2024, BAP nomor: 581/PSDKPLan.6-PPK/PL.420/V/2024 Tgl 12-05-2024 senilai **Rp1,516,882,-**
- Pembayaran Belanja Perencanaan Pos Pengawasan Kapal Termin I sesuai SPK Nomor: 220/PSDKPLan.6/PL.420/II/2024 Tgl 29-02-2024, BAST Nomor: 575/PSDKPLan.6-PPK/PL.420/V/2024 Tgl 13-05-2024, BAP Nomor: 578/PSDKPLan.6PPK/PL.420/V/2024 Tgl 14-05-2024 senilai **Rp1,608,750,-**
- Pembayaran Belanja Modal Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan berdasarkan SP nomor: 336/PSDKPLan.6-PPK/PL.430/III/2024 Tgl 25-3-2024, BAST nomor: 644/PSDKPLan.6-PPK/PL.420/V/2024 Tgl 27-5-2023, BAP nomor: 647/PSDKP Lan.6-PPK/PL.420/V/2024 Tgl 27-5-2024 senilai **Rp805,405,-**
- Pembayaran Belanja Pengawasan Pemb.Ruang Penampungan Sementara Termin II sesuai SP nomor :1375/PSDKPLan.6/PL.420/X/2024 Tgl 08-10-2024, BAST nomor: 1813.3/PSDKP Lan.6/PL.420/XII/2024, Tgl 15-12-2024, BAP nomor: 1830/PSDKPLan.6/PL.450/XII/2024 Tgl 17-12-2024 senilai **Rp39,840,-**
- Pembayaran Belanja Pengawasan Pemb.Ruang Penampungan Sementara Termin II sesuai SP nomor: 1375/PSDKPLan.6/PL.420/X/2024 Tgl 08-10-2024, BAST nomor: 1813.3/PSDKP Lan.6/PL.420/XII/2024, Tgl 15-12-2024, BAP No.1830/PSDKP Lan.6/PL.450/XII/2024 Tgl 17-12-2024 senilai **Rp45,676,-**
- Pembayaran Belanja Perencanaan Pembangunan Ruang Penampungan Sementara Termin II sesuai SP nomor: 1094/PSDKPLan.6/PL.420/VIII/2024 Tgl 15-12-2024, BAST nomor: 1813.4/PSDKPLan.6/PL.420/XII/2024, Tgl 15-12-2024, BAP nomor: 1832/PSDKPLan.6/PL.450/XII/2024 Tgl 17-12-2024 senilai **Rp155,500,-**
- Pembayaran Belanja Pembangunan Ruang Penampungan Sementara Termin III sesuai SP nomor: 1340/PSDKP Lan.6/PL.420/X/2024 Tgl 04-10-2024, BAST nomor: 1812/PSDKPLan.6/PL.420/XII/2024 Tgl 14-12-2024, BAP nomor: 1814/PSDKPL an.6/PL.450/XII/2024 Tgl 16-12-2024 senilai **Rp478,010,-**

⇒ Terdapat Pagu Anggaran Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual yang merupakan **Program Prioritas Nasional (PN)** diantaranya: rE

No.	Kegiatan	KRO	RO	Rincian Output	Pagu	Realisasi
1	2350	QDD	1	001-Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina	100.000.000	99.998.608
2	2350	QHD	1	001-Operasi Kapal Pengawas	36.771.307.000	22.620.076.862
3	2350	QHD	3	003-Operasi Speedboat Pengawas	2.338.435.000	2.337.075.410
4	2350	RBQ	1	001-Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	1.013.440.000	982.814.189
5	2350	RCG	1	001-Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	6.141.530.000	6.020.499.903
6	2352	QIC	1	001-Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	1.086.000.000	1.023.560.316
7	2352	QIC	2	002-Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	132.000.000	120.999.264
8	2353	QIC	4	004-Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	1.770.000.000	1.619.985.212

⇒ Terdapat Penghentian Aset dari Penggunaan pada Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual senilai **Rp3.982.361.544** diantaranya:

- Melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: 950/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara yaitu berupa Speedboat dengan Tipe Napholeon 43/FRP in Board 12 Meter senilai **Rp1.991.180.772**; Status barang dalam kondisi rusak berat.
- Melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: 806/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara yaitu berupa Speedboat dengan Tipe Napholeon 44/FRP in Board 12 Meter senilai **Rp1.991.180.772**; Status barang dalam kondisi rusak berat.

⇒ Terdapat Perencanaan dan Pembangunan pada Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual senilai **Rp59.362.800** diantaranya:

- Perencanaan Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Sorong dan Pembangunan Rumah senilai **Rp31.746.000**;
- Pembangunan Penampungan Sementara di lahan kantor Pangkalan Pengawasan SDKP Tual senilai **Rp27.616.800**.

⇒ Terdapat Koreksi Pencatatan Modul Aset Tetap sebanyak **62 Barang** sesuai Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Modul Aset Tetap nomor: B.1976/PSDKPLan.6/PL.710/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 (terlampir) pada Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual senilai **Rp726.320.046**

⇒ Capaian Output Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual periode TA 2024 diantaranya:

- Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP memiliki pagu anggaran senilai **Rp100.000.000,00** dengan realisasi mencapai **Rp99.998.608,00** atau 100% (Persen) sehingga Target Output Kinerja Sudah Terpenuhi.

2. Operasi Kapal Pengawas memiliki target 180 hari operasi dengan pagu anggaran senilai **Rp36.771.307.000,00** sementara realisasi sudah mencapai 121 hari operasi senilai **Rp14.169.977.620,00** atau 38,54% (Persen) dari realisasi kinerja 67,03% (Persen) sehingga terdapat GAP sebesar 28,49% (Persen) hal ini dikarenakan kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan / masih dalam proses.
3. Operasi Speedboat Pengawas memiliki target 35 hari operasi dengan pagu anggaran senilai **Rp2.338.435.000,00** sementara realisasi sudah mencapai 26 hari operasi senilai **Rp1.123.447.246,00** atau 48,04% (Persen) dari realisasi kinerja 74,02% (Persen) sehingga terdapat GAP sebesar 25,98% (Persen) hal ini dikarenakan kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan / masih dalam proses.
4. Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun memiliki target sebanyak 3 unit bangunan dengan pagu anggaran senilai **Rp1,013,440,000.00** sementara realisasi baru mencapai 1 unit bangunan senilai **Rp95,800,394.00** atau 9,45% (Persen) dari realisasi kinerja 80,00% (Persen) sehingga terdapat GAP sebesar 70,55% (Persen) hal ini dikarenakan dua kegiatan pembangunan lainnya masih dalam tahap perencanaan dan persiapan pembangunan.
5. Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat memiliki target sebanyak 13 unit dengan pagu anggaran senilai **Rp6,141,530,000.00** sementara realisasi sudah mencapai 10 unit senilai **Rp 2,278,584,279.00** atau 37,1% (Persen) dari realisasi kinerja 76,00% (Persen) sehingga terdapat GAP sebesar 38,9% (Persen) hal ini dikarenakan kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan / masih dalam proses.
6. Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya memiliki target sebanyak 13 lembaga dengan pagu anggaran senilai **Rp6,141,530,000.00** sementara realisasi melebihi target yaitu 18 lembaga yang diawasi dengan nilai **Rp637,220,566.00** atau 58,68% (Persen) dari realisasi kinerja 100,00% (Persen) sehingga terdapat GAP sebesar 41,32% (Persen) hal ini dikarenakan kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan / masih dalam proses.
7. Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak memiliki target sebanyak 40 lembaga dengan pagu anggaran senilai **Rp132,000,000.00** sementara realisasi sudah mencapai 35 lembaga yang diawasi dengan nilai **Rp35,974,059.00** atau 35,36% (Persen) dari realisasi kinerja 87,78% (Persen) sehingga terdapat GAP sebesar 52,42% (Persen) hal ini dikarenakan kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan / masih dalam proses.
8. Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya memiliki target sebanyak 270 lembaga dengan pagu anggaran senilai **Rp1,770,000,000.00** sementara realisasi melebihi target yaitu 295 lembaga yang diawasi dengan nilai **Rp625,870,617.00** atau 58,68%

(Persen) dari realisasi kinerja 100,00% (Persen) sehingga terdapat GAP sebesar 41,32% (Persen) hal ini dikarenakan kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan / masih dalam proses.

⇒ Pertanggungjawaban atas pemakaian Pagu Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp20,301,559,000.00 memiliki realisasi sebesar **Rp20,301,233,298.00** dan sisa sebesar Rp 325,702 diantaranya digunakan untuk:

1. Pemakaian Bahan Bakar Minyak untuk 2 Unit Kapal yaitu KP.Hiu Macan 06 dan KP.Hiu 14 yaitu sebesar **Rp19,078,151,000.00** sehingga masih terdapat sisa anggaran yaitu Rp 203,000.00;
2. Pemakaian Pelumas untuk 2 Unit Kapal yaitu KP.Hiu Macan 06 dan KP.Hiu 14 yaitu sebesar **Rp110,511,000.00** sehingga terdapat sisa anggaran yaitu sebesar Rp 1,000.00;
3. Ongkos Angkut BBM (2 Unit Kapal) yaitu sebesar **Rp109,829,434** sehingga terdapat sisa anggaran yaitu sebesar Rp 120,566.00;
4. Uang Jaga Sandar KP. Hiu Macan 06 [20 ORG x 185 HARI] yaitu sebesar **Rp72,503,800.00** sehingga masih terdapat sisa anggaran yaitu sebesar Rp 200.00;
5. Uang Jaga Sandar KP. Hiu 14 [13 ORG x 185 HARI] yaitu sebesar **Rp56,954,300.00** sehingga masih terdapat sisa anggaran yaitu sebesar Rp 700.00;
6. Biaya Delegasi KP. Hiu Macan 06 [20 ORG x 180 HARI] yaitu sebesar **Rp410,525,000.00** sehingga masih terdapat sisa anggaran yaitu sebesar Rp0.00;
7. Biaya Delegasi KP. Hiu 14 [13 ORG x 180 HARI] senilai **Rp229,685,000.00** sehingga masih terdapat sisa anggaran yaitu sebesar Rp0.00.
8. Dukungan KP PNBP yaitu sebesar **Rp 233,073,764.00** sehingga terdapat sisa anggaran yaitu sebesar Rp 236.00;

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

• Rekening Pemerintah dan NPWP Satuan Kerja.

Berdasarkan surat persetujuan kembali atas pembukaan rekening milik Pangkalan Pengawasan SDKP Tual dari KPPN Tual Nomor S-4/WPB.32/KP.03/2021 Tanggal 05 Januari 2021 bahwa pada dasarnya menyetujui pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Mandiri Cabang Tual dengan Nomor rekening **186-00-0202100-0** a.n **BPG 084 PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL**. NPWP Pangkalan Pengawasan SDKP Tual **00.172.735.3-941.000** a.n Pangkalan Pengawasan SDKP Tual.

- **Struktur Pejabat Pengelola Anggaran**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.82/MEN/KU.611/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Perubahan Ketsatu Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (terlampir) dengan rincian sebagai berikut:

EKSISTING	
<i>Kuasa Pengguna Anggaran</i>	<i>Sigit Bintoro, S.Pi</i>
	19721022 199803 1 004

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.001/KPA-LAN.6/KU.611/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual (terlampir) dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Pejabat Pembuat Komitmen	Yopi Yuspilan, S.Pi
Pejabat Pembuat Komitmen	Zulfikar Afandy, S.Pi, M.Si
Pejabat PSPM	Zulfikar Anshari Rumakey, S.Pi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.002/KPA-LAN.6/KU.611/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual (terlampir) dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Bendahara Pengeluaran	Junawilman Rahakbauw, A.Md,

- **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Revisi.**

DIPA Petikan Tahun Anggaran 2024 Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual (440853) Nomor: SP DIPA-032.05.2.440853/2023 Tanggal 23 November 2023, kode *Digital Stamp (DS)* : 2981-0100-6709-1267 dengan Nilai Pagu Anggaran **Rp70.706.563.000,-** (Tujuh Puluh Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu *Rupiah*).

Sampai dengan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan periode TA 2024 tanggal 30 Juni 2024 ini, Satker Pangkalan Pengawasan SDKP

Tual (440853) telah melakukan revisi DIPA sebanyak 6 (enam) kali dengan keterangan sebagai berikut:

- **Revisi DIPA ke 01** hanya Revisi Blokir AA sebesar Rp. 949.524.000 dan Buka Blokir Perangkat Pengolah Data sebesar Rp. 150.000.000
- **Revisi DIPA ke 02** hanya Revisi Halaman III DIPA meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024.
- **Revisi DIPA ke 03** hanya Revisi Halaman III DIPA yang meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024.
- **Revisi DIPA ke 04** hanya Buka anggaran yang diblokir sebesar total Rp. 82.250.000 yang di revisi ke anggaran Listrik Darat oleh karena adanya peningkatan biaya Listrik Darat dikarenakan potensi pada Tahun 2024 banyak Kapal Pengawas Perikanan yang melakukan Pengawasan di Zona 3 (WPP 718) dan bersandar di Dermaga Pangkalan PSDKP Tual dan Pengurangan Volume Output Dikarenakan terjadi kesalahan pada sistem SAKTI pada saat penginputan sehingga mengakibatkan Volume Output pada 2355.CAN (Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan 2355.EBB (Layanan Sarana dan Prasarana Internal) terinput otomatis mengikuti Volume Output TA.2023 dimana yang seharusnya 2355.CAN hanya 6 Unit menjadi 12 Unit dan 2355. EBB yang seharusnya 5 Unit menjadi 6 Unit.
- **Revisi DIPA ke 05** hanya Revisi Halaman III DIPA yang meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024.
- **Revisi DIPA ke 06** hanya Revisi Halaman III DIPA yang meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024.
- **Revisi DIPA ke 07** hanya Revisi Halaman III DIPA meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan PSDKP Tual serta Revisi Penghematan Perjalanan Dinas.
- **Revisi DIPA ke 08** Revisi DJA Buka Blokir RCG Perawatan Kapal Pengawas sebesar Rp115.000.000.
- **Revisi DIPA ke 09** Revisi Penghematan Perdin 50% Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor: S-1023/MK.02-2024 Tanggal 7 November 2024.

Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI.

Terdapat hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Belanja Pegawai Tugas Belajar di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP, UPT Pangkalan PSDKP Tual terhitung mulai tahun 2022 s/d tahun 2023 yaitu senilai **Rp16,470,000,-** sesuai Surat Tugas Anggota IV BPK RI Nomor: 01/ST/VI/01/2024 tanggal 9 Januari 2024. Berikut akan dijelaskan secara detail berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 5.1 Rekapitulasi berdasarkan Satker

No	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)				Jumlah
	Tunjangan Jabatan Fungsional 2022	Tunjangan Jabatan Umum 2022	Tunjangan Jabatan Fungsional 2023	Tunjangan Jabatan Umum 2023	
1	3.240.000	3.330.000	3.240.000	6.660.000	16.470.000
Jumlah	3.240.000	3.330.000	3.240.000	6.660.000	16.470.000

Tabel 5.2 Rekapitulasi berdasarkan Pegawai

No	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)					Jumlah
	Nama NIP	Tunjangan Jabatan Fungsional 2022	Tunjangan Jabatan Umum 2022	Tunjangan Jabatan Fungsional 2023	Tunjangan Jabatan Umum 2023	
1	Seto Nugroho, S.Pi 198412212008011004	3.240.000	1.110.000	-	2.590.000	7.680.000
2	Felix Paduli, A.Md 197910112006041004	-	2.220.000	-	1.850.000	4.070.000
3	Riyan Maulana, S.Pi 199204242015031001	-	-	1.620.000	1.110.000	3.470.000
4	Hadi Purwanto, S.Pi 199204242015031001	-	-	1.620.000	1.110.000	3.470.000
Jumlah					16.470.000	

- Menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Belanja Pegawai Tugas Belajar pada tabel tersebut diatas, maka:
 1. Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode Billing Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 2. Kepada Para Pegawai tersebut diatas diwajibkan untuk melakukan pembayaran;
 3. Bendahara Penerimaan menerbitkan Bukti Penerimaan Negara melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (Simponi);

- Adapun Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) Pegawai Tugas Belajar tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Seto Nugroho, S.Pi

- a. NTPN: **C91D51JNFV2CSRV7** senilai Rp3,240,000 atas pengembalian tunjangan jabatan fungsional tahun 2022.
- b. NTPN: **3F51E7QLUP33NS9O** senilai Rp1,110,000 atas pengembalian tunjangan jabatan umum tahun 2022.
- c. NTPN: **F60DD48VVEPI3T0Q** senilai Rp2,590,000 atas pengembalian tunjangan jabatan umum tahun 2023.

2. Felix Paduli, A.Md

- a. NTPN: **E13752G4VPKPA0NC** senilai Rp2,220,000 atas pengembalian tunjangan jabatan umum tahun 2022.
- b. NTPN: **4B91861QV3UAU017** senilai Rp1,850,000 atas pengembalian tunjangan jabatan umum tahun 2023.

3. Riyan Maulana, S.Pi

- a. NTPN: **8AAEF6U8EUGNB4S8** senilai Rp1,620,000 atas pengembalian tunjangan jabatan fungsional tahun 2023.
- b. NTPN: **330A57QLUP33Q1R7** senilai Rp1,110,000 atas pengembalian tunjangan jabatan umum tahun 2023.

4. Hadi Purwanto, S.Pi

- a. NTPN: **5CAE32G4VPKPC39K** senilai Rp1,620,000 atas pengembalian tunjangan jabatan fungsional tahun 2023.
- b. NTPN: **B50BF55DF9BUJ2S3** senilai Rp1,110,000 atas pengembalian tunjangan jabatan umum tahun 2023.